

Sistem Informasi Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa Biru Kecamatan

Jenny Setiadi^{*1}, Salman Topiq²

^{1,2} Program Studi Teknik Informatika, Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, Bandung
e-mail: *jennysetiady@gmail.com, Salman@ars.ac.id

Abstrak

Produk hukum seperti peraturan dan keputusan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dari tahun ke tahun semakin banyak. Jumlah produk hukum terutama yang berkaitan dengan peraturan yang cukup banyak baik dari pemerintah pusat maupun daerah tidak sebanding dengan ketersediaan informasi akan peraturan tersebut. Informasi peraturan tersebut banyaknya tidak dipublikasikan secara umum sehingga masyarakat cukup sulit dalam mengakses peraturan-peraturan tersebut. Seiring dengan semakin banyaknya produk hukum yang baru, maka masyarakat perlu mengetahui tentang peraturan tersebut agar masyarakat selalu mendapatkan perkembangan informasi yang cepat. Maka dari itu, perlunya dibangun suatu sistem yang menghadirkan sebuah informasi yang bertujuan mendokumentasikan berbagai informasi hukum yang tersedia sehingga dapat diakses oleh masyarakat desa secara khusus dan masyarakat luas secara umum. Metode penelitian yang digunakan adalah model pengembangan sistem waterfall, dimana penelitian diawali dari analisa kebutuhan hingga proses pengembangan sistem. Hasil dari penelitian ini dapat membantu masyarakat desa untuk dapat mengakses informasi hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kata kunci— Sistem informasi, Dokumentasi, Produk Hukum, JDIH

Abstract

Legal products such as regulations and decisions from both the central government and local governments are increasing from year to year. The number of legal products, especially those related to regulations, which are quite a lot from both the central and local governments are not proportional to the availability of information on these regulations. Most of the information on these regulations is not published publicly so that it is quite difficult for the public to access these regulations. Along with the increasing number of new legal products, the public needs to know about these regulations so that the public always gets the rapid development of information. Therefore, it is necessary to build an information system that can document various available legal information so that it can be accessed by the village community in particular and the wider community in general. The research method used is the waterfall system development model, where the research starts from needs analysis to the system development process. The results of this study can help rural communities to be able to access legal information issued by the central government and local governments.

Keywords— information system, documentation, legal products, JDIH

Corresponding Author:

Salman Topiq,

Email: salman@ars.ac.id

1. PENDAHULUAN

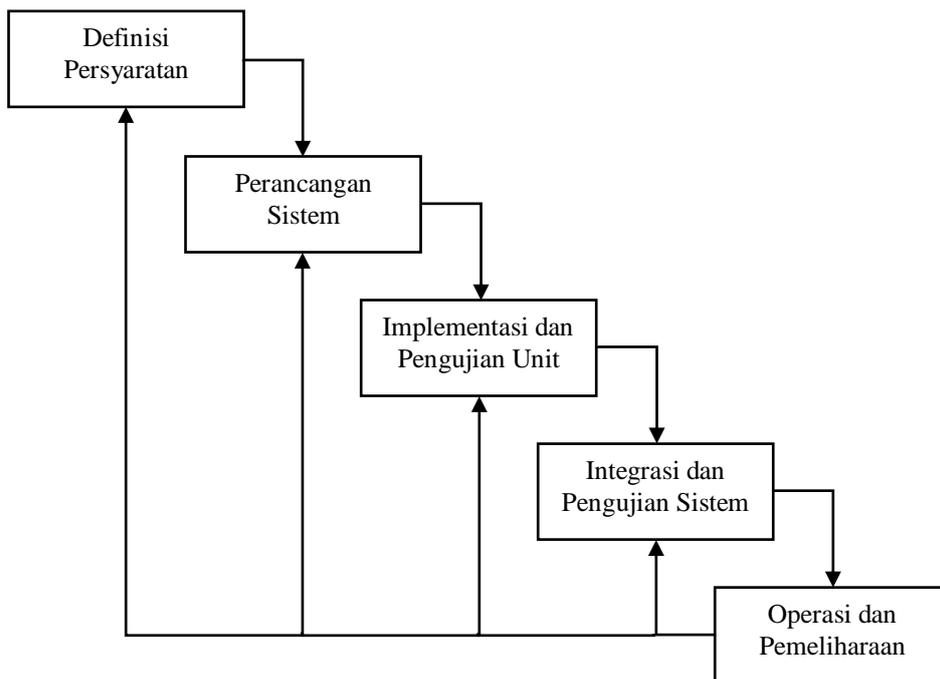
Produk hukum seperti peraturan dan keputusan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dari tahun ke tahun semakin banyak [1]. Diketahui sampai dengan tahun 2021, terdapat 3.669 Peraturan Pemerintahan Pusat hingga 15.982 Peraturan Pemerintah Daerah [2] Jumlah produk hukum terutama yang berkaitan dengan peraturan yang cukup banyak baik dari pemerintah pusat maupun daerah tidak sebanding dengan ketersediaan informasi akan peraturan tersebut [3]. Informasi peraturan tersebut banyaknya tidak dipublikasikan secara umum sehingga masyarakat cukup sulit dalam mengakses peraturan-peraturan tersebut [4]. Pemerintah desa dinilai menjadi lembaga penyedia informasi yang transparan bagi masyarakat di wilayahnya [5]. Desa Biru yang terletak di kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat saat ini sedang berupaya dalam mengembangkan sistem informasi terpadu pada laman resmi desa. Berbagai informasi resmi dari Desa Biru seperti profil desa, data desa serta publikasi desa telah tersedia, akan tetapi informasi mengenai dokumentasi produk hukum seperti peraturan-peraturan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintah desa.

Kumpulan peraturan dan keputusan yang merupakan produk hukum tersebut dapat didokumentasikan dan dipublikasikan sebagai informasi hukum kepada masyarakat luas melalui program Dokumentasi dan Informasi Hukum [3] Pada umumnya diarsipkan di kantor desa dalam bentuk fisik (*hard copy*) sehingga menyulitkan pencarian dan penelusuran informasi hukum. Sistem informasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dapat digunakan untuk mengarsipkan dokumen sehingga memudahkan dalam mencari dokumen yang diinginkan berdasarkan kriteria tertentu berupa repositori [6]. Repositori dapat berfungsi juga sebagai portal informasi yang transparan dimana dokumen dapat diunduh dan dibaca oleh berbagai pihak yang membutuhkan [7].

Sistem informasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum ini dinilai dapat memudahkan pencarian sehingga dari sisi waktu lebih efisien dan dokumen dapat lebih mudah diunduh dan diakses oleh berbagai pihak sehingga lebih transparan. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan maka, Desa Biru Kecamatan Majalaya berupaya untuk membangun Sistem Informasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk penelusuran produk yang lebih baik. Sehingga pada penelitian skripsi ini penulis mengambil tema skripsi “Sistem Informasi Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung”.

2. METODE PENELITIAN

Pengembangan sistem *Waterfall*, Metode ini adalah model pengembangan perangkat lunak yang sistematis dan sekuensial [8].



Gambar 1. Model Waterfall

1. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak

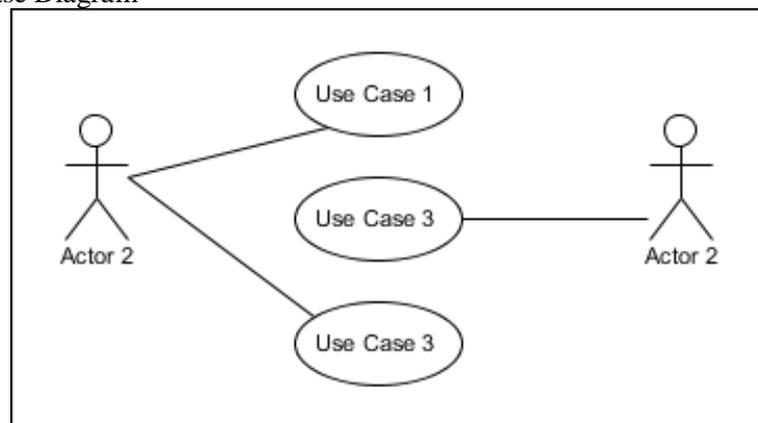
Menurut [9] sebelum melakukan tahap pengembangan sistem informasi, peneliti melakukan proses analisis kebutuhan berupa studi literatur.

2. Desain Perangkat Lunak

Merupakan sebuah tahapan dalam perancangan suatu sistem yang mengalokasikan kebutuhan suatu sistem seperti hardware maupun juga software dengan proses membentuk arsitektur sistem secara keseluruhan yang juga melibatkan identifikasi dan penggambaran suatu abstraksi sebuah sistem software dan dasar hubungannya [10]

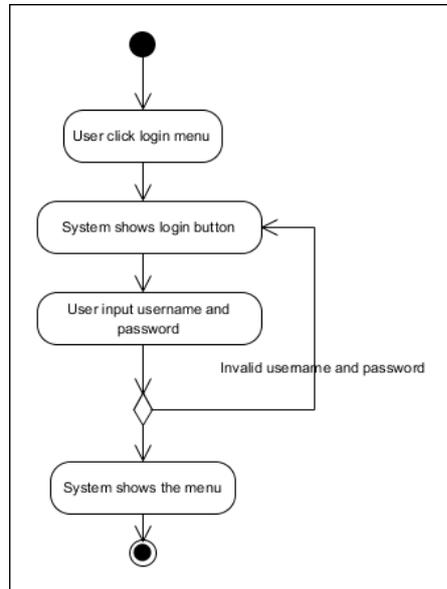
Perancangan berorientasi objek berbasis Unified Modeling Language (UML), diantaranya:

a. Use Case Diagram



Gambar 2. Contoh Use Case Diagram

- b. Activity Diagram
3. *Activity diagram* digunakan untuk menggambarkan keseluruhan alur dan proses bisnis pada setiap kebutuhan sistem yang sudah dirancang menggunakan *use case diagram* sebelumnya.



Gambar 3. Contoh Activity Diagram

4. Desain Basis Data

Menurut [11], basis data adalah suatu kumpulan logikal data yang berhubungan dan dekripsi dari data tersebut yang di rancang untuk kebutuhan informasi suatu organisasi. Dalam sistem sistem dokumentasi dan informasi hukum desa Biru, *Entity Relationship Diagram* (ERD) sebuah sistem yang dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah entitas apa saja yang diperlukan serta hubungan antar entitas pada database.

5. Pembuatan Kode Program

Dari kode dan bahasa pemrograman yang hanya dimengerti oleh alat penunjang pada komputer maka harus ditranslasikan ke dalam sebuah program peranti lunak. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini pembuatan *database* menggunakan MySQL diawali dengan pembuatan tabel dilanjutkan penentuan *primary key* dan *foreign key* dalam tabel tersebut, serta pembuatan Sistem Informasi menggunakan Bahasa pemrograman PHP dengan *Framework Laravel*.

6. Testing

Pada tahap ini melakukan pengujian terhadap program yang sudah dibuat untuk memastikan semua perintah dan fungsi [12].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisa Kebutuhan

Pada tahapan analisa kebutuhan dilakukan pengumpulan data analisa sistem berjalan yang digunakan saat ini untuk identifikasi agar dapat mengetahui kebutuhan sistem yang akan dibangun[10].

3.1.1. Tahap Analisis

Terdapat beberapa pengguna utama dalam sistem informasi dokumentasi informasi hukum ini, yakni administrator selaku pengelola website dan pengguna selaku end user dari website jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Berikut ini merupakan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak berdasarkan jenis pengguna:

a. Administrator

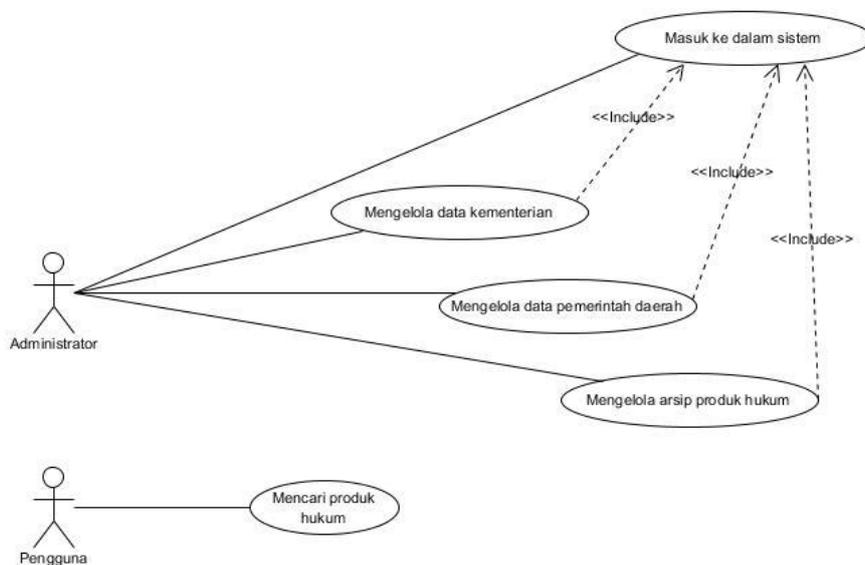
Kebutuhan perangkat lunak bagi administrator yang merupakan pengelola dari sistem informasi ini administrator dapat masuk ke dalam sistem informasi, dapat mengelola kementerian dan mengelola pemerintah daerah, serta beroperasi untuk mengelola arsip dokumen produk hukum.

b. Pengguna

Berikut adalah kebutuhan dari perangkat lunak bagi pengguna yang merupakan end user dari sistem informasi ini:

1. Pengguna dapat mencari produk hukum

3.1.2 Use Case Diagram



Gambar 4. Use Case Diagram Sistem Informasi

Tabel 1. Deskripsi Use Case Masuk ke dalam Sistem Informasi

<i>Use Case Name</i>	Use Case Masuk ke dalam Sistem Informasi
<i>Requirement</i>	-
<i>Goal</i>	Digunakan untuk masuk ke dalam Sistem Informasi
<i>Pre Condition</i>	Belum masuk ke dalam Sistem Informasi
<i>Post Condition</i>	Sudah masuk ke dalam Sistem Informasi
<i>Failed End Condition</i>	Gagal masuk ke dalam Sistem Informasi
<i>Primary Actors</i>	Pengguna dan Administrator

Tabel 2. Deskripsi Use Case Mengelola Data Kementerian

<i>Use Case Name</i>	Use Case Mengelola Kementerian
<i>Requirement</i>	Masuk ke dalam Sistem Informasi
<i>Goal</i>	Digunakan untuk mengelola kementerian
<i>Pre Condition</i>	Administrator belum mengelola kementerian
<i>Post Condition</i>	Administrator telah mengelola kementerian
<i>Failed End Condition</i>	Administrator gagal mengelola kementerian
<i>Primary Actors</i>	Administrator
<i>Main Flow/Basic Path</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Administrator dapat melihat data kementerian • Administrator yang dapat menambahkan data

	kementerian <ul style="list-style-type: none"> • Administrator untuk mengelola pemereintah daerah • Administrator yang beroperasi untuk mengelola arsip dokumen produk hukum
--	--

Tabel 3. Deskripsi *Use Case* Mengelola Pemerintah Daerah

<i>Use Case Name</i>	<i>Use Case</i> Mengelola Pemerintah Daerah
<i>Requirement</i>	Masuk ke dalam Sistem Informasi
<i>Goal</i>	Digunakan untuk mengelola pemerintah daerah
<i>Pre Condition</i>	Administrator belum mengelola pemerintah daerah
<i>Post Condition</i>	Administrator telah mengelola pemerintah daerah
<i>Failed End Condition</i>	Administrator gagal mengelola pemerintah daerah
<i>Primary Actors</i>	Administrator
<i>Main Flow/Basic Path</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Administrator dapat melihat pemerintah daerah • Administrator dapat menambahkan pemerintah daerah • Administrator dapat mengubah pemerintah daerah • Administrator dapat menghapus pemerintah daerah

Tabel 4. Deskripsi *Use Case* Mengelola Produk Hukum

<i>Use Case Name</i>	<i>Use Case</i> Mengelola Produk Hukum
<i>Requirement</i>	Masuk ke dalam Sistem Informasi
<i>Goal</i>	Digunakan untuk mengelola Produk Hukum
<i>Pre Condition</i>	Administrator belum mengelola Produk Hukum
<i>Post Condition</i>	Administrator telah mengelola Produk Hukum
<i>Failed End Condition</i>	Administrator gagal mengelola Produk Hukum
<i>Primary Actors</i>	Administrator
<i>Main Flow/Basic Path</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Administrator dapat melihat Produk Hukum • Administrator dapat menambahkan Produk Hukum • Administrator dapat mengubah Produk Hukum • Administrator dapat menghapus Produk Hukum

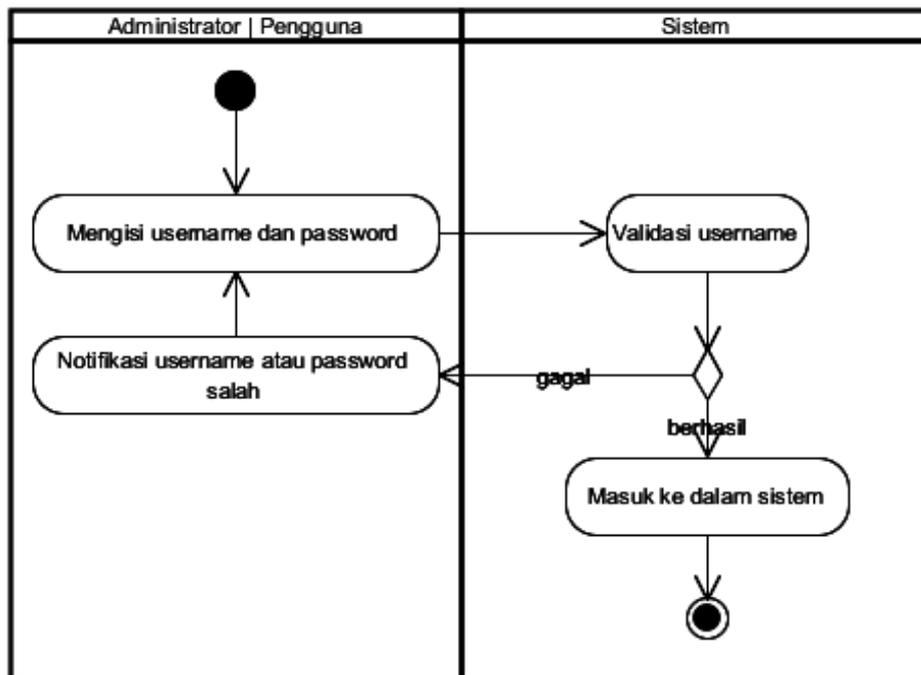
Tabel 5. Deskripsi *Use Case* Mencari Produk Hukum

<i>Use Case Name</i>	<i>Use Case</i> Mencari Produk Hukum
<i>Requirement</i>	-
<i>Goal</i>	Digunakan untuk mencari Produk Hukum
<i>Pre Condition</i>	Belum mencari Produk Hukum
<i>Post Condition</i>	Telah mencari Produk Hukum
<i>Failed End Condition</i>	-
<i>Primary Actors</i>	Pengguna
<i>Main Flow/Basic Path</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna dapat mencari Produk Hukum • Pengguna dapat mengunduh dokumen Produk Hukum

3.1.3 Activity Diagram

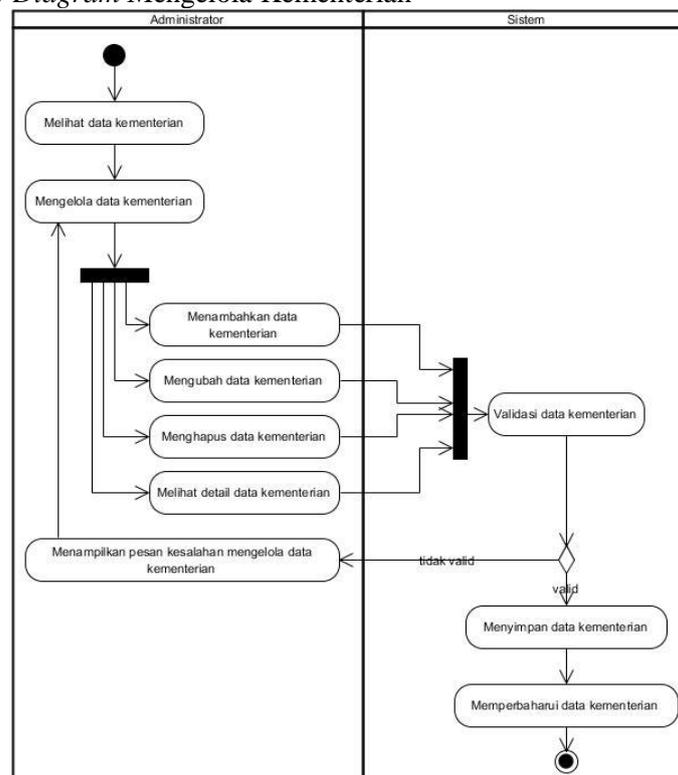
Adalah teknik menggambarkan proses bisnis, logika prosedural, dan jalur kerja. Berikut merupakan *Activity Diagram* yang menggambarkan Sistem Informasi:

1. *Activity Diagram* Masuk ke dalam Sistem Informasi



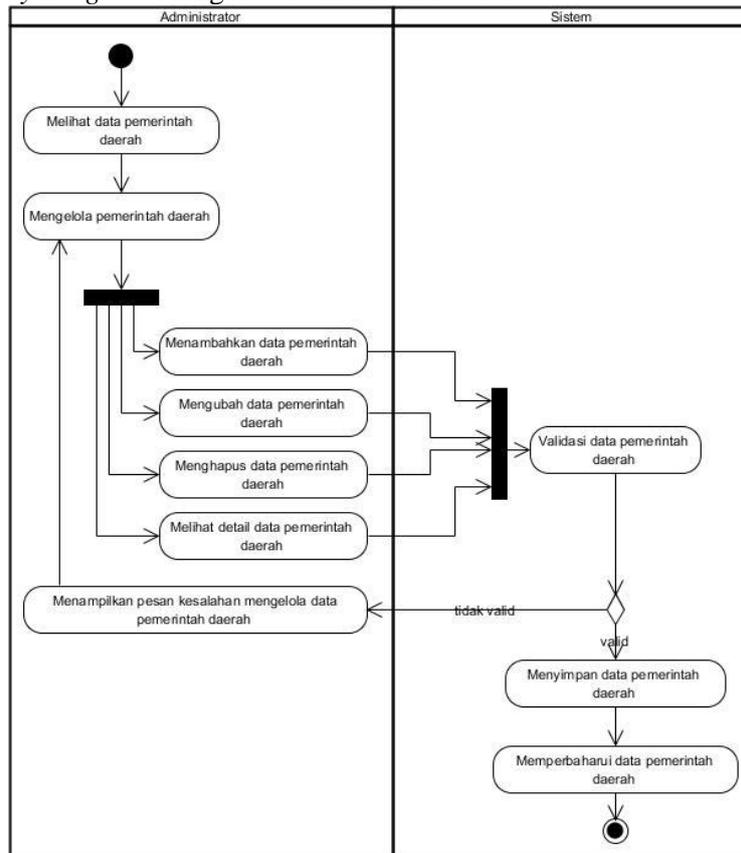
Gambar 5. *Activity Diagram* Masuk ke dalam Sistem Informasi

2. *Activity Diagram* Mengelola Kementerian



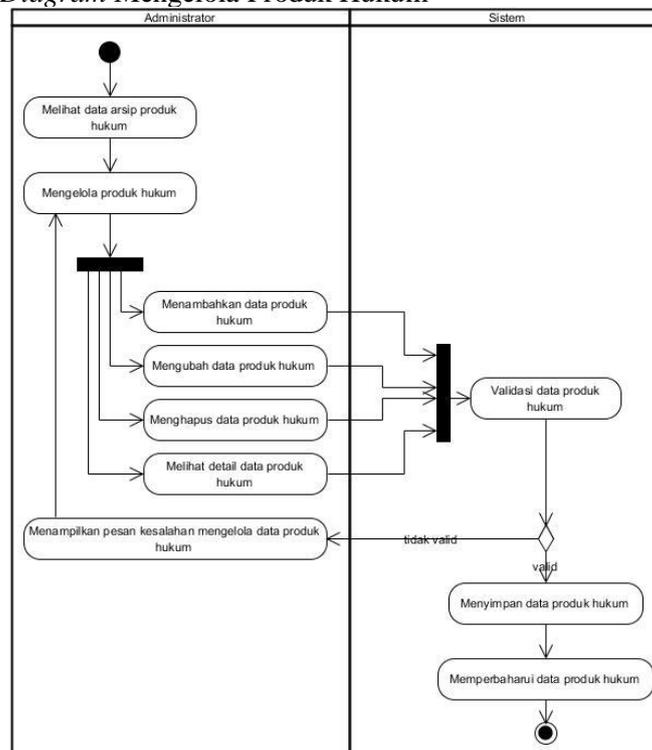
Gambar 6. *Activity Diagram* Mengelola Data Kementerian

3. *Activity Diagram* Mengelola Pemerintah Daerah



Gambar 7. *Activity Diagram* Mengelola Pemerintah Daerah

4. *Activity Diagram* Mengelola Produk Hukum



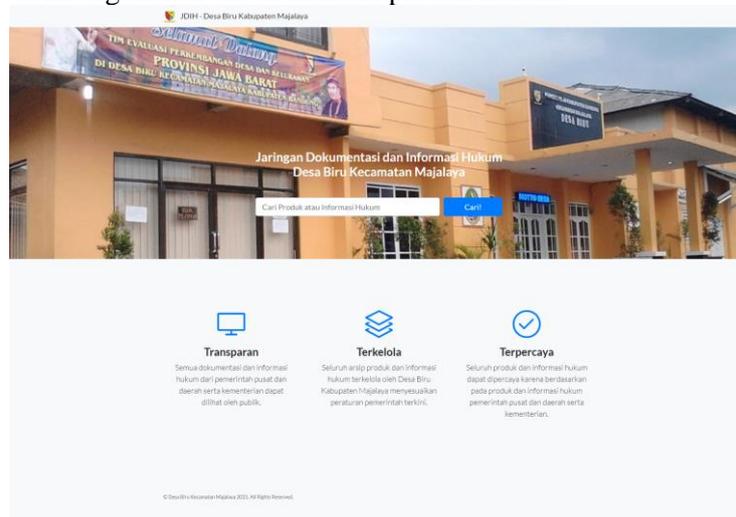
Gambar 8. *Activity Diagram* Mengelola Produk Hukum

3.2. Implementasi

Berikut merupakan beberapa tampilan hasil dan pembahasan dari SISTEM INFORMASI DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DESA BIRU KECAMATAN MAJALAYA

c. Halaman awal

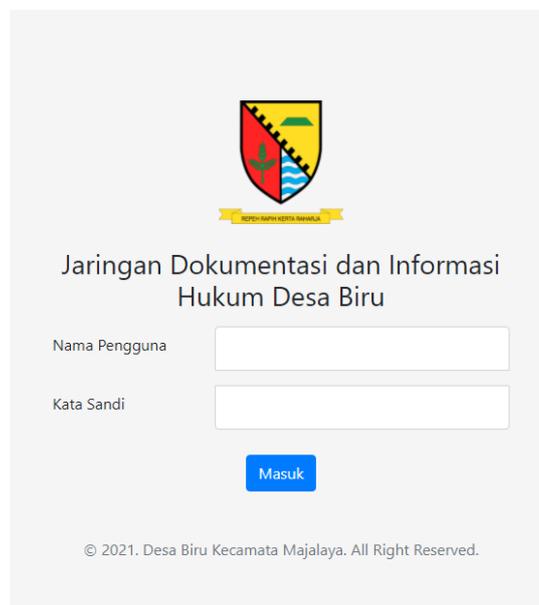
Pada halaman awal ini digunakan untuk mencari produk hukum.



Gambar 10. Halaman Awal

d. Halaman Login

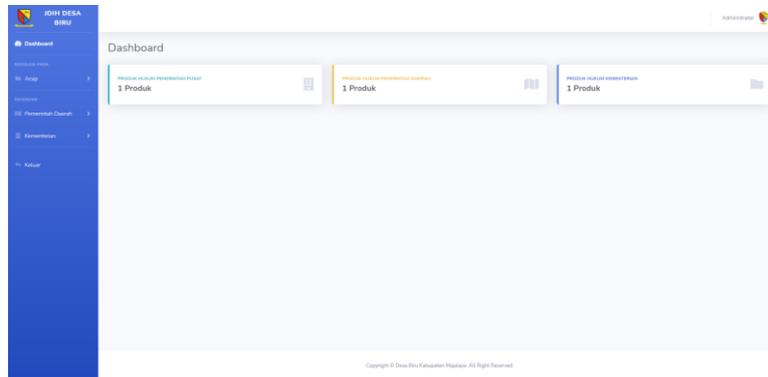
Halaman ini digunakan untuk mengautentikasi pengguna Sistem Informasi, dalam hal ini apakah administrator atau pengguna. Pada halaman login ini juga akan menampilkan surel email yang akan berfungsi sebagai *username* juga kata sandi yang perlu diisi oleh pengguna, kemudian divalidasi oleh sistem. Apabila username dan kata sandi tersebut cocok, jika telah terpenuhi maka user atau pengguna dapat mengakses ke Sistem Informasi.



Gambar 11. Halaman Login

e. Halaman Dashboard

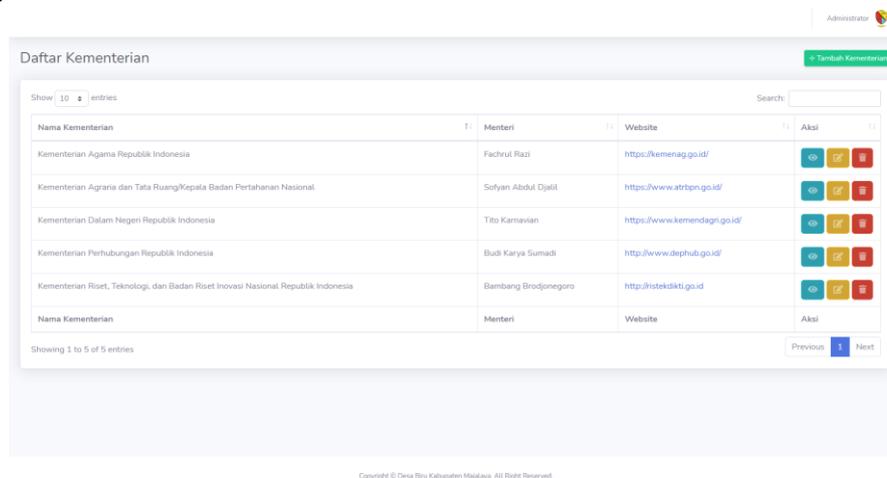
Dalam halaman dashboard dapat dilihat beberapa rekap total produk hukum untuk setiap lembaga.



Gambar 12. Halaman Dashboard

f. Halaman Kelola Kementerian

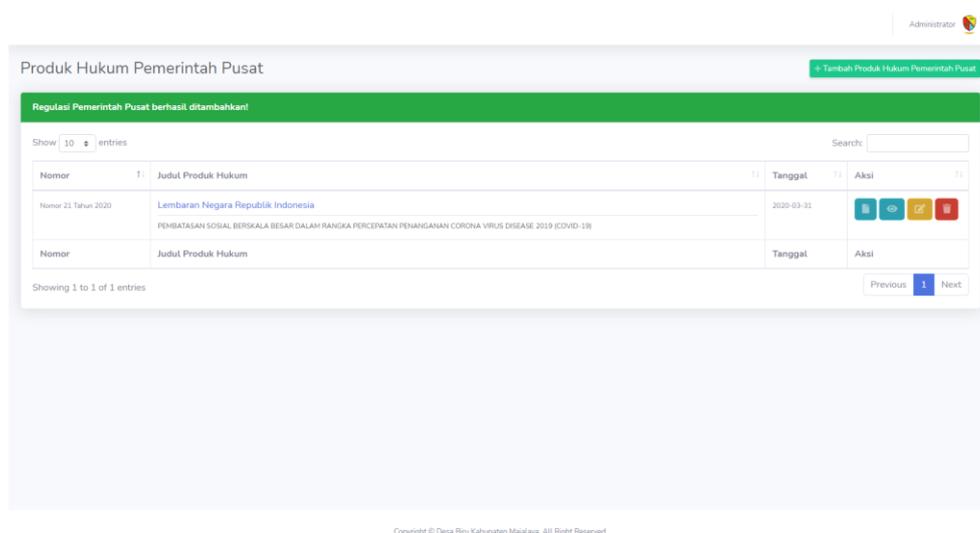
Halaman ini digunakan untuk mengelola data sistem dalam kementerian. Administrator dalam pengolahan datanya dapat menambahkan, menghapus juga mengubah apa yang terdapat didalamnya.



Gambar 13. Halaman Data Kementerian

g. Halaman Kelola Produk Hukum

Halaman digunakan untuk mengelola data produk dalam bidang hukum. Pada laman ini juga administrator dapat menambahkan, mengubah dan menghapus produk yang terdapat dalam data hukum.



Gambar 14. Halaman Data Produk Hukum

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penulis terhadap hasil penelitian:

1. Arsip produk hukum dari berbagai instansi pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kementerian, disimpan dalam sistem informasi dokumentasi dan informasi hukum pada Desa Biru Kecamatan Majalaya ini. Produk hukum tersebut dapat dikelola oleh staff Desa Biru Kecamatan Majalaya untuk menjadi *repository*.
2. Sistem informasi dokumentasi dan informasi hukum pada Desa Biru Kecamatan Majalaya ini dapat diakses seluruh masyarakat publik melalui jaringan internet sehingga dapat memudahkan publik untuk mendapatkan informasi terkait produk hukum baik yang dikeluarkan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kementerian.

TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.
3. Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.
4. Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.
5. Bapak Salman Topiq, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing.
6. Bapak/ibu dosen Teknik Informatika Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya yang telah memberikan penulis semua bahan yang diperlukan.
7. Staff/karyawan/dosen di lingkungan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.
8. Bapak H. Hari Hardiawan, selaku Kepala Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung
9. Staff/karyawan di lingkungan Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung
Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan modal maupun spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Salami, M., & Kurniawan, A. T. (2016). Analisis Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Mendukung Proses Legislasi Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan* , 91-100.
- [2] Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021, Juni 18). *Beranda Peraturan Kementerian Hukum dan HAM RI*. Diambil kembali dari Peraturan Kementerian Hukum dan HAM RI: <https://peraturan.go.id/>
- [3] Pramono, D. (2015). Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Online: Evaluasi Situs Web Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 22-27.
- [4] Rahman, Y. N. (2020). ANALISIS PENGGUNAAN FRAMEWORK WEBSITE JDIH KHUSUS PERATURAN KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL TEKNOLOGI DAN OPEN SOURCE*, 78-89.
- [5] Kumalasari, D., & Riharjo, I. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*.
- [6] Irwansyah, M. (2015). Sistem Informasi Repository Digital Beban Kerja Dosen. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Teknik Informatika*.
- [7] Rengkung, R., Sentinuwo, S. R., & Karouw, S. (2015). Pembangunan Sistem Informasi Repository Berbasis Teknologi Web Component Studi Kasus GMIM Bukit Moria Winangun. *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*.
- [8] Sasmito, G. (2017). Penerapan Metode Waterfall pada desain sistem informasi geografis industri Kabupaten Tegal. *JPIT*, 2(1), 6–12.
- [9] Berlian, F. & Rangga S. (2021). SISTEM INFORMASI ABSENSI MENGGUNAKAN FOTO SELFIEDAN GEOTAGGING. *Jurnal Responsif*. 3(2): 145-150
- [10] Akhmad S. & Purwaningsih. (2020). SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ADMINISTRASI KEUANGANPANTI ASUHAN BERBASIS WEBSITE. *Jurnal Responsif*. 2(2): 150-157
- [11] Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, 6th Edition*. New York: Pearson.
- [12] Muhammad Ma'ruf Holid Junaedi, Sari Susanti, & Ade Mubarak. (2020). PENERAPAN FRAMEWORK LARAVEL PADA APLIKASI HRIS (HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM). *Jurnal Responsif*. 2(2): 176-183